

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan penduduk berkaitan erat dengan pendapatan yang diperoleh rumah tangga. Dalam *welfare economics*, pendapatan rumah tangga tidak terlepas dari masalah ketenagakerjaan dalam arti pendapatan ataupun penghasilan yang diperoleh rumah tangga berkaitan dengan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh anggota rumah tangga. Dengan pendapatan yang diperoleh maka rumah tangga akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyekolahkan anggotanya. Melalui salah satu jalur pendidikan inilah maka sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga mempunyai kesempatan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Tetapi sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi tergantung pada kemampuan negara atau pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi di antara masyarakat dan distribusi pendapatan serta kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan sarana utama untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan manusia yang secara empirik terbukti merupakan syarat perlu pembangunan manusia. Dalam hal ini

ketenagakerjaan merupakan jembatan utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kapabilitas manusia (UNDP, 1996. Dengan perkataan lain, yang diperlukan bukan semata-mata pertumbuhan tetapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam arti berpihak kepada tenaga kerja.

Heinzt (2003) dalam Sianipar (2010) menyampaikan tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu komponen pertumbuhan yakni upaya menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan teguh, komponen kesempatan kerja yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut menciptakan lapangan kerja baru dan memperbaharui kualitas pekerjaan yang telah ada, kemudian yang terakhir adalah fokus pada kemiskinan dimana adanya hubungan antara kelompok masyarakat dan rumah tangga miskin dengan kesempatan kerja baru dan peningkatan kualitas kesempatan kerja.

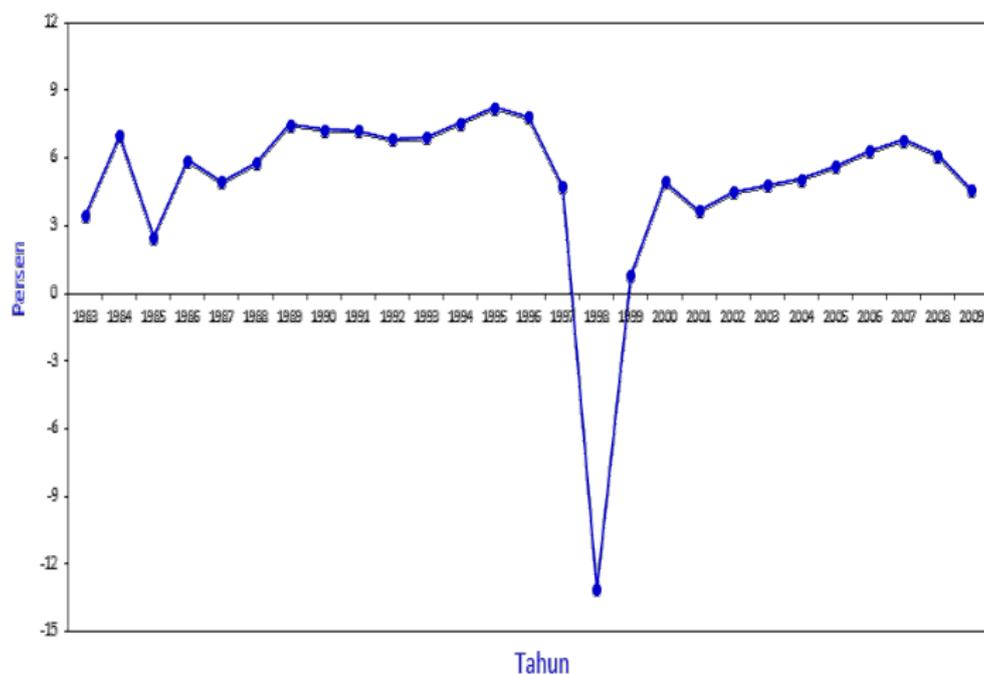
Selama bertahun-tahun pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama bagi para pemimpin politik dan pengambil keputusan berdasarkan suatu pandangan bahwa semakin banyak distribusi barang-barang dan jasa akan meningkatkan derajat hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sering kali dipandang sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan lain seperti meningkatnya jumlah pencari kerja maupun untuk mengurangi defisit anggaran. masalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan pengangguran tingkat kemiskinan telah diangkat menjadi isu sentral akhir-akhir ini. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 bahkan telah mengangkat isu tersebut dengan mengusung tema RKP 2008 dengan nama “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mengurangi

Kemiskinan dan Pengangguran” yang diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menunjang tercapainya sasaran pokok tersebut.

Perkembangan selanjutnya ditandai munculnya suatu keraguan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan jawaban untuk menyelesaikan semua masalah. Hal ini bukan tanpa alasan tetapi didasari fakta bahwa sebagian masyarakat tetap miskin meskipun hidup ditengah-tengah lingkungan kemewahan. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi pada negara-negara yang sudah maju. Berdasarkan bukti empirik menunjukkan bahwa suatu wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun mempunyai tingkat pengangguran yang juga tinggi. Dalam kasus ini, pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu wilayah kurang menciptakan lapangan kerja. Hal inilah kemudian menimbulkan perdebatan antara kelompok yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang disebut *pro-growth* dan kelompok yang menentang atau yang *anti-growth*. Pertumbuhan ekonomi selayaknya dipandang tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia mengalami pasang surut dan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi politik dan keamanan dalam negeri sangat berpengaruh terhadap pembangunan dibidang ekonomi. Demikian pula faktor eksternal, bila terjadi goncangan ekonomi utamanya di negara maju maka dampaknya akan terasa terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Setelah mengalami pertumbuhan yang luar biasa selama

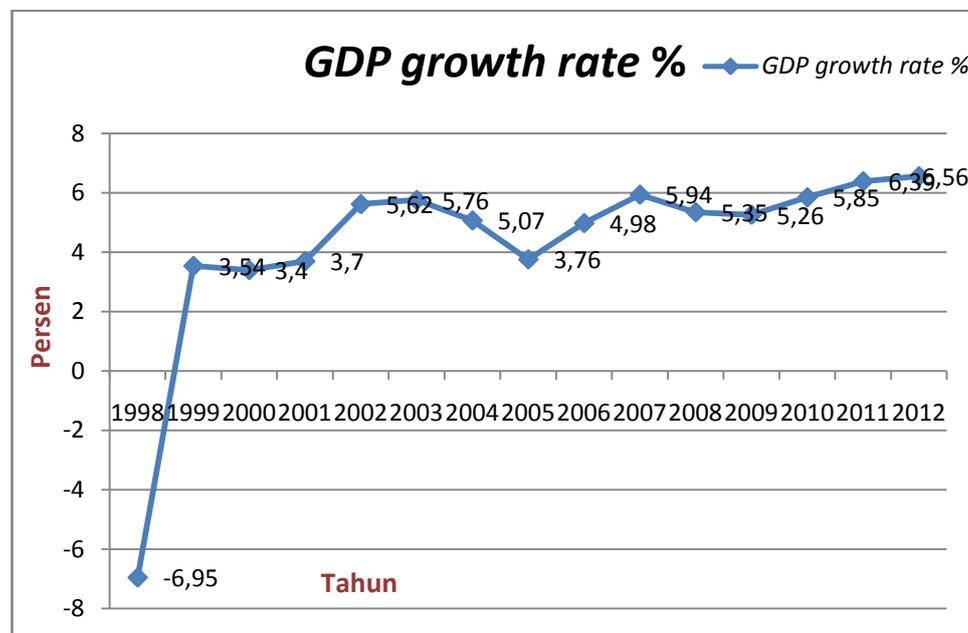
1970-1996, ekonomi Indonesia mengalami krisis mulai pertengahan tahun 1997. Kondisi ini membuat tekanan terhadap sektor ekonomi semakin berat. Pada tahun 1998, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Growth Domestic Product* (GDP) turun menjadi 13 persen (minus) setelah mengalami pertumbuhan 4,7 persen pada tahun 1997. Pada waktu yang bersamaan inflasi turun dari 6,6 persen menjadi 77,7 persen. Mulai 1999, kondisi ekonomi mulai menunjukkan pemulihan secara perlahan. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 3,5 persen pada tahun 2001 naik menjadi 4,1 persen pada tahun 2003 dan pada tahun 2009 diperkirakan PDB tumbuh sekitar 4,5 persen.



Sumber: Badan Pusat statistic (BPS)

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Indonesia selama 26 tahun terakhir, 1983-2009.

Kemudian bagaimana dengan keadaan di Provinsi Lampung? Tentunya pertumbuhan ekonomi Nasional akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Di Provinsi Lampung sendiri terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,95 persen (minus) dimana pada saat itu Provinsi Lampung juga terkena dampak dari guncangan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Kemudian mulai membaik pada tahun 1999 yaitu tumbuh menjadi 3,35 persen dan terus meningkat secara perlahan naik menjadi 4,98 persen pada tahun 2006 dan naik menjadi 5,85 pada akhir tahun 2010 dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 2: Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung 14 tahun terakhir, 1998-2012.

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung, 1998-2012.

Provinsi Lampung		
Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB
1998	18,481,527.00	-6.95
1999	21,624,169.00	3.54
2000	23,210,411.00	3.4
2001	24,126,379.00	3.7
2002	25,005,636.00	5.62
2003	26,388,410.00	5.76
2004	27,711,820.00	5.07
2005	28,808,121.00	3.76
2006	30,861,360.00	4.98
2007	32,694,890.00	5.94
2008	34,414,653.00	5.35
2009	36,256,295.00	5.26
2010	38,378,425.00	5.85
2011	40,829,411.00	6.39
2012	43,505,816.00	6.56

Sumber: BPS Lampung

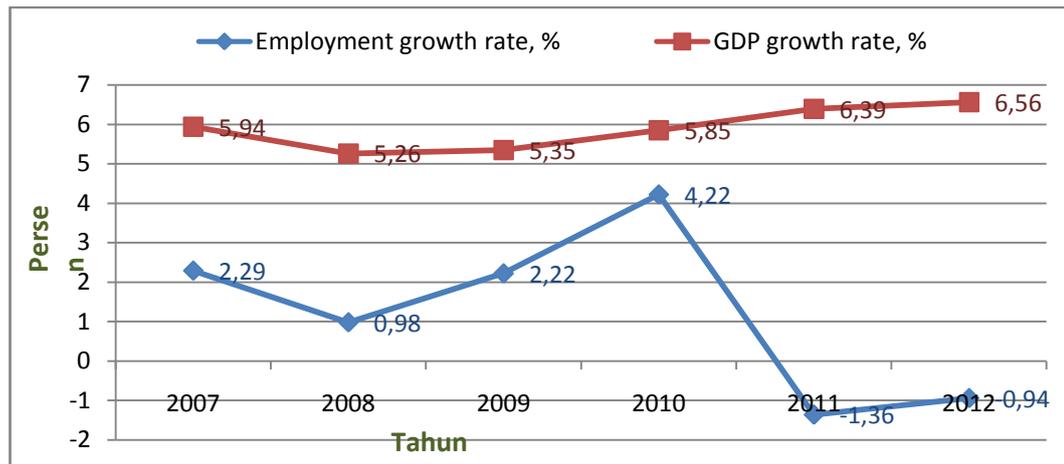
Dalam Tabel 1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB yang merupakan pencerminan dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung cenderung meningkat. Dimulai dari angka minus 6,95 persen pada tahun 1998 dimana Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi. Kemudian merangkak naik mulai tahun 1999 sampai tahun 2005 kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 3,76 persen, dari angka sebelumnya 5,07 persen pada tahun 2004. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama hingga pada saat ini Laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Lampung menembus angka 6,56 persen. Pertumbuhan Ekonomi yang terus naik diharapkan mampu mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung.

Tabel 2. Penyerapan Tenaga Kerja Pulau Sumatera Tahun 2012.

Provinsi	Jumlah Angkatan			Penyerapan
	Bekerja (Orang)	Pengangguran (Orang)	Kerja (Orang)	Tenaga Kerja (%)
Nanggroe Aceh Darussalam	1798547	179944	1978491	90.9
Sumatera Utara	5751682	379982	6131664	93.8
Sumatera Barat	2037642	142184	2179826	93.48
Riau	2399002	107774	2506776	95.7
Jambi	1423624	47296	1470920	96.78
Sumatera Selatan	3532932	213441	3746373	94.3
Bengkulu	830266	31128	861394	96.39
Lampung	3449307	188590	3637897	94.82
Kepulauan Bangka Belitung	583102	21061	604163	96.51
Kepulauan Riau	824567	46798	871365	94.63
Indonesia	110808154	7244956	118053110	93.86

Sumber: Pusdatinaker Data Agustus 2012

Jika dilihat dari Tabel 2 maka dari seluruh provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera angka penyerapan tenaga kerja yang terendah pada tahun 2012 adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sebesar 90,90 persen kemudian diikuti dengan provinsi Sumatera Barat dengan angka penyerapan tenaga kerja sebesar 93,80 sedangkan Provinsi Lampung yaitu sebesar 94,82 persen. Angka tersebut masih berada di bawah Provinsi Jambi dengan angka penyerapan tenaga kerja sebesar 96,78 persen.



Gambar 3. Laju pertumbuhan Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung 2007-2012.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat pulih tersebut diiringi dengan tingkat penduduk yang bekerja yang cenderung menurun merupakan permasalahan utama di sektor ketenagakerjaan. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sekitar 6,39 persen, namun hal tersebut belum secara nyata dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja. Teori ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan semakin banyaknya output nasional mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja, sehingga seharusnya mengurangi pengangguran. Dalam penelitian Nur, 2011 mengelompokkan Provinsi Lampung sebagai daerah yang mengalami hubungan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi disisi lain tingkat penyerapan tenaga kerja relatif rendah.

Periode setelah krisis terdapat karakteristik seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi dan masih tingginya tingkat pengangguran sebagai dampak dari rendahnya dan turunnya investasi. Tantangan pemerintah saat ini adalah bagaimana meningkatkan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tetapi berpihak kepada tenaga kerja sehingga secara terus-menerus akan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah ada yang salah dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu wilayah dalam hal ini Provinsi Lampung? Apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dicapai menjadi jaminan bahwa akan menciptakan penyerapan tenaga yang tinggi pula? Sebenarnya masalah pertumbuhan ekonomi yang hanya mengejar dari aspek kuantitas mendapat kritikan dari *United Nations Development Programme* (UNDP) sekitar 15 tahun yang lalu. UNDP mengkritik para pembuat kebijakan yang terlalu terpikat oleh aspek kuantitas pertumbuhan ekonomi dan mengadvokasi mereka agar memberi perhatian yang memadai terhadap aspek struktur dan kualitasnya. UNDP mengingatkan konsekuensi yang akan dihadapi jika aspek kualitatif ini diabaikan sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini (UNDP, 1996:2):

—Unless governments take timely corrective action, economic growth can become lopsided and flawed. Determined efforts are needed to avoid growth that is jobless, ruthless, voiceless and futureless”

Kecuali jika pemerintah mengambil suatu tindakan koreksi yang tepat, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pincang dan cacat. Menentukan berbagai upaya dibutuhkan untuk menghindari pertumbuhan yang tidak menyerap tenaga kerja, kesenjangan, tanpa partisipasi masyarakat/demokrasi, dan tanpa-masa-depan.

Istilah pertumbuhan berkualitas memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam bahasa lugas supaya mudah dipahami. Sederhananya, tidak terlalu keliru jika kita memandangnya dari sisi negatif atau komplemennya yaitu pertumbuhan tak berkualitas. Menurut UNDP pertumbuhan ekonomi timpang atau cacat jika ekonomi secara keseluruhan tumbuh tetapi tidak memperluas kesempatan kerja. Ini bukan istilah yang bersifat teoritis-hipotesis semata melainkan merujuk pada situasi konkrit di lapangan berdasarkan bukti yang sangat menyakinkan. Adapun ciri-ciri pertumbuhan tak berkualitas menurut UNDP:

- Sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi menguntungkan kelompok kaya, mengabaikan jutaan penduduk berjuang dalam kemiskinan yang semakin mendalam (*ruthless growth*)
- Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan perluasan demokrasi dan pemberdayaan (*voiceless growth*)
- Pertumbuhan ekonomi menyebabkan budaya melemah (*rootless growth*)
- Generasi sekarang menghamburkan sumber daya yang dibutuhkan oleh generasi mendaang (*futureless growth*)

B. Masalah Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu isu dalam makroekonomi, dimana setiap periode masyarakat suatu Negara akan berusaha menambah kemampuannya untuk memproduksi produk, baik itu berupa barang maupun jasa. Dengan bertambahnya kapasitas produksi, permintaan akan faktor-faktor produksi akan meningkat pula termasuk faktor produksi tenaga kerja. Dengan demikian, keadaan tersebut akan menciptakan kesempatan kerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan demikian. Penelitian empiris di banyak Negara berkembang menemukan bahwa pertumbuhan yang tercipta ternyata tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, beberapa permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimanakah pengaruh dari PDRB riil terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung?
- 2) Bagaimanakah pengaruh dari tingkat Upah riil terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung?
- 3) Bagaimanakah pengaruh dari harga modal bidang pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung?
- 4) Bagaimanakah pengaruh dari Indeks Harga Implisit terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis pengaruh PDRB riil terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung
- 2) Menganalisis pengaruh tingkat Upah riil terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung
- 3) Menganalisis pengaruh harga modal bidang pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung
- 4) Menganalisis pengaruh Indeks Harga Implisit terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung

E. Kontribusi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya bidang ekonomi dan sosial yang terkait dengan isu ketenagakerjaan dan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan khususnya dalam upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung.
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan acuan bagi Provinsi Lampung untuk mengelolanya secara efektif dan efisien serta dapat dijadikan sebagai faktor pendorong (*push factor*) untuk membuat kebijakan yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja.

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pembandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya

F. Kerangka Pikir

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia untuk dapat berlangsung secara berkesinambungan. Dalam hal ini ketenagakerjaan yang merupakan jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia menjadi pilar penting dalam pembangunan. Untuk mewujudkannya maka pemerintah perlu membuka peluang akses sebesar-besarnya kepada masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi berdasarkan potensi wilayah yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Selanjutnya disusun strategi pembangunan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang saling bersinergi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ramah terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja

Isu ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam perkembangan sosial ekonomi di Indonesia disamping isu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan disamping keadaan angkatan kerja (*economically active*) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu tentang pengangguran sebagai residu dari tingkat penduduk yang bekerja (*employment rate*). Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring

dengan bertambahnya jumlah penduduk. Masih rendahnya tingkat penduduk yang bekerja tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu kurun waktu tertentu.

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai aspek untuk menuju kehidupan yang lebih baik diwaktu sekarang maupun diwaktu mendatang. Pembangunan perlu dipahami sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik, serta kebudayaan. Tujuannya adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kemakmuran berkaitan dengan aspek ekonomi, dapat diukur dengan tingkat produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Sedangkan kesejahteraan ditentukan oleh aspek non-ekonomi, misalnya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Sebagai sebuah proses, pembangunan menunjukkan adanya hubungan saling pengaruh mempengaruhi antara berbagai faktor yang dihasilkannya. Dalam kaitan ini data statistik diperlukan untuk dapat melihat proses itu secara obyektif (berdasarkan fakta yang sebenarnya), memonitor dan mengevaluasi perkembangannya, serta merancang proses selanjutnya berdasarkan pemahaman obyektif atau berbasis empiris.

Sudah lebih dari 30 tahun para pakar pembangunan diilhami ide paradigma modernisasi. Paradigma tersebut mengandalkan tetesan strategi pertumbuhan (*growth*) ekonomi untuk mengatasi masalah sebagai akibat pembangunan seperti kemiskinan. Salah satu asumsi paradigma pertumbuhan adalah perlunya investasi kapital besar-besaran pada perusahaan industri modern dan aplikasi teknologi modern pada produksi. Terciptanya sektor industri yang dinamis melalui investasi tidak hanya membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja besar-besaran serta menyerap surplus tenaga kerja pedesaan yang subsisten ke sektor modern. Secara tidak langsung, akan terjadi peningkatan penghasilan dari banyak orang. Dengan peningkatan penghasilan, banyak keluarga akan mendapat sarana untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka.

Asumsi paradigma pertumbuhan tidak sepenuhnya mengandung kebenaran, karena meskipun banyak negara berkembang telah berhasil mengalami peningkatan dalam angka pertumbuhannya, tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti dengan perbaikan nasib kaum miskin. Dalam arti keberhasilan pembangunan tidak diiringi keberhasilan dari sisi sektor ketenagakerjaan. Meskipun pertumbuhan ekonomi relatif cukup tinggi, namun tidak banyak menyerap tenaga kerja. Investasi lebih banyak disektor yang padat modal tetapi bukan disektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Akhirnya, muncul pengakuan bahwa paradigma *growth* tadi yang memakai PDRB sebagai tolok ukurnya dianggap kurang sensitif terhadap upaya perbaikan kualitas hidup manusia.

Siregar (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Pengertian pengurangan kemiskinan dalam hal ini bisa diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru atau dengan kata lain meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana orang miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

Fungsi permintaan tenaga kerja biasanya didasari dengan teori ekonomi neoklasik, dimana ekonomi pasar diasumsikan bahwa pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga pasar atau dapat dikatakan perusahaan hanya sebagai *price taker*. Dalam hal memaksimalkan laba pengusaha hanya mengatur berapa jumlah tenaga kerja yang dapat dipekerjakan.

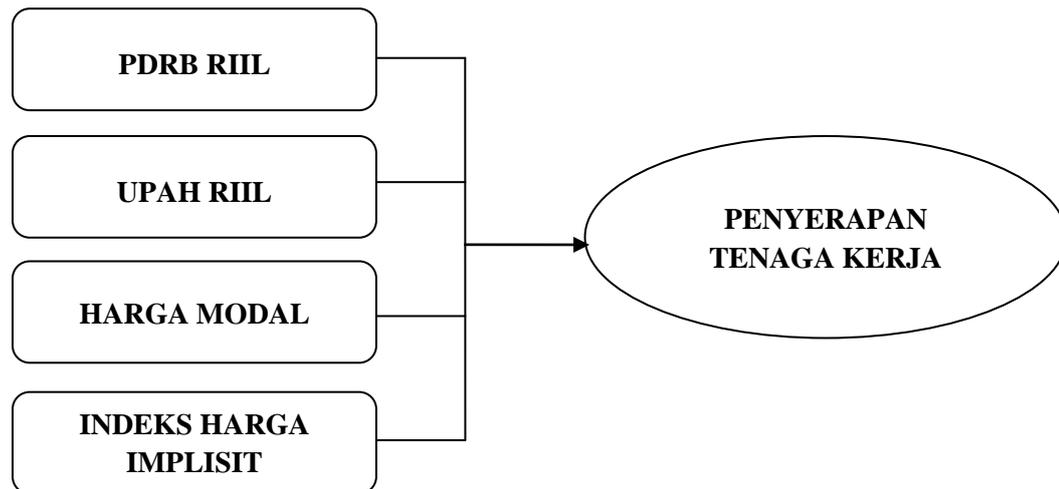
Permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tentunya berbeda dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Disaat masyarakat membeli barang karena memberikan nilai kegunaan kepada konsumen, lain halnya dengan pengusaha yang memperkerjakan seseorang yang bertujuan untuk membantu memproduksi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Dalam rangka memproduksi barang dan jasa perusahaan membutuhkan biaya input sehingga perusahaan mendapatkan input yang akan menghasilkan output. Perusahaan harus memutuskan yang mana rencana kemungkinan produksi yang akan digunakan. Dalam penelitian ini perusahaan diasumsikan memaksimalkan keuntungan. Menurut Jehle (2007) fungsi keuntungan perusahaan hanya bergantung pada harga input, harga input lain dan harga output atau yang juga dikenal sebagai *Input demand*.

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa penyerapan tenaga kerja di pengaruhi oleh harga input, harga input lain dan harga output. Akan tetapi data-data tersebut sulit didapatkan sehingga peneliti mengambil data untuk mewakili atau proksi (*proxies*) dari variabel tersebut. Variabel harga input dapat diwakili dengan Upah riil dimana tuntutan kenaikan upah tiap tahun akan memberatkan pihak yang memerlukan tenaga kerja sehingga perusahaan akan bertahan untuk merekrut tenaga baru atau tetap akan melakukan rekrutmen dengan sistem *off-sourcing*. Variabel selanjutnya yaitu harga input lain yang dapat diwakili oleh harga modal dengan menggunakan harga modal pertanian, dimana sektor pertanian merupakan sektor dengan andil yang cukup besar terhadap nilai PDRB di Provinsi Lampung. Kemudian harga output diwakili dengan menggunakan Indeks Harga Implisit yang merupakan pencerminan perubahan harga barang dan jasa secara umum di tingkat produsen.

Dari uraian diatas bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah yang tercermin dalam PDRB dan ketenagakerjaan memiliki kaitan yang erat. Dari hubungan ini selanjutnya dibangun suatu model ekonometrika yang mampu menggambarkan

terjadinya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu model ini juga mampu untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja dan respon penyerapan tenaga terhadap perubahan faktor-faktor tersebut serta elastisitas penyerapan tenaga kerja.



Gambar 4. Kerangka Pemikiran Pembangunan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan alur kerangka berfikir penelitian di atas maka hipotesis yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung
- 2) Upah riil berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung
- 3) Harga Modal berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung
- 4) Indeks Harga Implisit berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.